

Media Cetak	Suara Merdeka
Tanggal	08 Februari 2023
Wilayah	Kota Surakarta



Kenaikan PBB 2023 Ditunda

Halaman 13

Kenaikan PBB 2023 Ditunda

Kelebihan Bayar Dikembalikan lewat Rekening

SOLO - Usai menuai protes warga, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 akhirnya ditunda Pemkot Surakarta.

Penundaan tersebut diputuskan sesuai Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota (Wawali) Teguh Prakosa, sejumlah anggota Fraksi PDIP DPRD Surakarta dan pejabat terkait lain, menggelar rapat di Taman Pracima Pura Mangkunegaran, Selasa (7/2). "Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nanti akan diputuskan kembali," ungkap Kepala Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda), Tulus Widajat, sesuai pertemuan.

Sebelumnya, kenaikan PBB 2023 dikeluhkan warga. Mereka menganggap kenaikan tarif pajak daerah tersebut terlampau tinggi jika dibandingkan dengan PBB 2022.

Keluhan tersebut disampaikan melalui berbagai kanal aduan Pemkot dan anggota DPRD.

"Nanti sesuai dengan regulasi yang ada, selisih pembayaran tagihan PBB yang sudah disetorkan warga akan dikembalikan dalam bentuk restitusi atau kelebihan pembayaran. Jadi warga membayar PBB 2023 sesuai dengan tagihan yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2022," ungkapnya.

Berdasarkan data Pemkot, beber Tulus, hingga Senin (6/2) terdapat sekitar 1.000 wajib pajak (WP) PBB yang sudah membayar pajak tersebut. Dana yang terkumpul dari pembayaran PBB itu berkisar Rp 2,5 miliar.

"Kelebihan bayar ini akan dikembalikan sesuai dengan mekanisme APBD. Akan dianggarkan sesuai ketentuan dan dimintakan persetujuan DPRD. Pengembaliannya akan lewat rekening pajak masing-masing WP dan akan ada sosialisasi sebelum pembayaran," terang Tulus.

Pembaruan Data

Kenaikan PBB itu berkaitan dengan beberapa hal, mulai pembaruan data objek pajak hingga peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD). Untuk 2023 PAD dipatok Rp 820 miliar, meningkat Rp 80 miliar dari PAD 2022.

Kenaikan tarif PBB itu diberlakukan bervariasi. Kenaikan 1-50% diterapkan kepada 64.273 WP, kenaikan 51-100% bagi 38.108 WP, kenaikan 101-200% bagi 16.398 WP, kenaikan 201-400% bagi 13.564 WP, kenaikan 401-500% bagi 176 WP, kenaikan 501-1.000% bagi 126 WP, dan di atas 1.000% untuk 23 WP. Adapun 7.2027 WP tidak dikenai kenaikan tarif.

Pemkot pun memberikan stimulus berupa keringanan pembayaran mulai 35-80%, tergantung besaran kenaikan PBB.

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka meminta warga tak lagi panik dengan simpang siur kabar lonjakan tarif PBB. Menurutnya, Pemkot juga akan mengoptimalkan potensi PAD dari sumber lain, seperti pajak hotel, hiburan hingga penagihan piutang PBB yang belum terbayarkan. (H73-49)